

IMPLEMENTASI PROGRAM TRIBINA DI KELURAHAN ANTASARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Novitasari¹, Arif Budiman², Yusran Fahmi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: novitasari27304@gmail.com

ABSTRAK

Program Tribina yang mencakup Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat peran keluarga. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan tahapan perkembangan keluarga, dengan tujuan mendorong terciptanya ketahanan serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada pelaksanaan program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah yaitu, kurangnya sosialisasi program Tribina di Kelurahan Antasari, kurangnya kemampuan dan sumber daya kader, serta waktu pelaksanaan program yang tidak menetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penentuan secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik diukur melalui model George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158) yaitu: Pertama Sub-variabel Komunikasi indikator Penyaluran Informasi (Sosialisasi) masih kurang optimal, Kejelasan sudah baik, dan Konsistensi waktu masih kurang konsisten. Kedua sub-variabel Sumber Daya indikator Sumber Daya Manusia kurang memadai, Sarana Prasarana memadai, dan Anggaran sudah memadai. Ketiga sub-variabel Disposisi indikator Komitmen/ Tanggung Jawab cukup baik, Pengaturan Birokrasi/Kesesuaian Penempatan Kader cukup sesuai, dan Insentif cukup memadai. Keempat sub-variabel Struktur Birokrasi indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) cukup sesuai, Koordinasi sudah baik, dan Evaluasi cukup baik. Adapun faktor pendukung implementasi program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; Kedua, anggaran yang cukup memadai; Ketiga, dukungan pemerintah dan instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat yaitu Pertama, kurangnya inisiatif dan peran kader dalam menyebarluaskan informasi adanya program Tribina di Kelurahan Antasari; Kedua, penyesuaian jadwal/waktu yang sulit untuk ditentukan; Ketiga, kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi kader dalam mengelola kegiatan Tribina ini.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Tribina

ABSTRACT

The Tribina Program, which includes the Family Development for Toddlers, Family Development for Adolescents, and Family Development for the Elderly is one of the government's policy initiatives aimed at strengthening the role of the family. This program is implemented through continuous guidance activities tailored to the stages of family development, with the objective of promoting family resilience and improving family welfare. However, in the implementation of the Tribina Program in Antasari Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, several issues were identified, including limited program socialization, insufficient capacity and resources of cadres, and the absence of a fixed schedule for program implementation. This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources were determined using purposive sampling, involving 14 informants. After data collection, the data were analyzed using data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Tribina Program in Antasari Subdistrict, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency is generally quite good, as measured using the implementation model proposed by George Charles Edwards III in Leo Agustino (2022:154-158). First, in the communication sub-variable, the indicator of information dissemination (socialization) is still not optimal, clarity is good, and time consistency remains

insufficient. Second, in the resource sub-variable, human resources are inadequate, facilities and infrastructure are sufficient, and funding is adequate. Third, in the disposition sub-variable, commitment and responsibility are quite good, bureaucratic arrangement and suitability of cadre placement are appropriate, and incentives are sufficiently adequate. Fourth, in the bureaucratic structure sub-variable, the indicators of (SOP) are fairly appropriate, coordination is good, and evaluation is quite good. The supporting factors for the implementation of the Tribina Program in Antasari Subdistrict, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency include: first, the availability of adequate facilities and infrastructure; second, sufficient budget allocation; and third, support from the government and related institutions. Meanwhile, the inhibiting factors are as follows: First, the lack of initiative and active involvement of cadres in disseminating information about the existence of the Tribina program in Antasari Village; Second, the difficulty in determining and adjusting schedules/time; Third, the lack of continuous training and guidance for cadres in managing Tribina activities.

Keywords: *Implementation, Program, Tribina*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial paling dasar yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk kualitas manusia sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Melalui keluarga, individu pertama kali mengalami proses pembelajaran nilai-nilai kehidupan, norma sosial, serta pembentukan sikap dan perilaku. Peran keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup fungsi pendidikan, sosial, perlindungan, serta pembinaan moral dan spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Interaksi yang berlangsung dalam keluarga menjadi sarana utama bagi individu untuk mempelajari tanggung jawab, kedisiplinan, empati, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang mampu menjalankan perannya secara optimal diyakini menjadi fondasi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing. Oleh karena itu, pembangunan keluarga memiliki posisi strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Peran strategis keluarga dalam kehidupan sosial menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk menempatkan pembangunan keluarga sebagai agenda penting yang didukung oleh kebijakan dengan landasan hukum yang jelas. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 47 dijelaskan bahwa arah pembangunan keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera melalui tahapan pelaksanaan yang terencana, sistematis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai implementasi dari amanat regulasi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan berbagai program yang berorientasi pada penguatan keluarga. Salah satu program yang dikembangkan adalah Program Tribina, yaitu program pembinaan keluarga yang disusun berdasarkan tahapan siklus kehidupan. Program ini meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), yang dirancang dengan pendekatan edukatif dan partisipatif guna membantu keluarga menjalankan fungsi dan perannya secara efektif sesuai dengan tahap perkembangan anggota keluarga.

Program Bina Keluarga Balita (BKB) difokuskan pada peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia balita, yang mencakup aspek kesehatan, pemenuhan gizi, serta perkembangan psikologis anak. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) diarahkan untuk memperkuat pemahaman orang tua dan remaja dalam menghadapi dinamika masa remaja, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai perilaku berisiko, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan pernikahan usia dini. Di sisi lain, Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia dalam lingkup keluarga melalui pendekatan sosial, emosional, serta spiritual, sehingga para lansia tetap merasa diakui, dihormati, dan memiliki peran yang bermakna dalam kehidupan keluarga.

Di tingkat daerah, pelaksanaan Program Tribina menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dilaksanakan bersama masyarakat dengan dukungan kader serta tokoh masyarakat. Tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh peran kader sebagai pelaksana kegiatan serta partisipasi aktif keluarga sasaran. Salah satu wilayah yang melaksanakan Program Tribina adalah Kelurahan Antasari di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Meskipun Program Tribina telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan. Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap pelaksanaan Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL) di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena permasalahan, yaitu kurangnya sosialisasi program Tribina di Kelurahan Antasari, kurangnya kemampuan dan sumber daya kader, serta waktu pelaksanaan program yang tidak menetap.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perhatian terhadap pelaksanaan program pembangunan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan Program Tribina dan Bina Keluarga Remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi (2022) mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program BKR telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui kegiatan penyuluhan dan aktivitas pendukung, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta pembatasan kegiatan selama masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Futiha Albab (2021) mengenai pelaksanaan Program Tribina Keluarga Sejahtera di Kampung KB Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengungkapkan bahwa program tersebut belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman serta belum adanya strategi yang efektif dalam penerapan kebijakan oleh para pelaksana program, sehingga capaian program dalam upaya pencegahan eksploitasi anak berdasarkan temuan di

lapangan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Wahab dalam Marwiyah (2022:36) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Riant Nugroho dalam Joko Pramono (2022:2) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang dirumuskan dapat tercapai, baik melalui pelaksanaan program secara langsung maupun melalui perumusan strategi turunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam dalam kondisi alami. Pendekatan kualitatif menekankan pengkajian terhadap gejala yang terjadi secara natural dan dilaksanakan langsung di lapangan, bukan dalam situasi buatan (Zuchri Abdussamad, 2021:30). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 14 orang informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Ibrahim, 2018:72). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator untuk menilai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai objek penelitian. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, bahan referensi dan mengadakan membercheck (Sugiyono, 2023:365-371).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Komunikasi

a. Penyaluran Informasi (Sosialisasi)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi Program Tribina di Kelurahan Antasari masih kurang optimal meskipun telah dilakukan melalui beberapa cara, seperti penyampaian undangan langsung oleh kader, kegiatan rutin masyarakat, serta pemanfaatan media sosial dan grup WhatsApp. Informasi program belum menjangkau seluruh RT dan keluarga sasaran secara merata, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum

memahami secara jelas tujuan, manfaat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan Program Tribina, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah, konsisten, dan menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas program.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi Program Tribina di Kelurahan Antasari telah dilakukan dengan jelas dan terarah. Informasi disampaikan oleh kader dan PKB pembina wilayah menggunakan bahasa yang sederhana, metode tatap muka, serta media visual yang membantu masyarakat memahami tujuan dan manfaat program sesuai dengan karakteristik sasaran. Selain itu, kejelasan informasi juga diperkuat dengan adanya dasar hukum yang tercantum dalam materi sosialisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, sehingga masyarakat memahami bahwa Program Tribina merupakan program resmi pemerintah dengan arah dan tujuan yang jelas.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari masih kurang konsisten dalam hal penjadwalan kegiatan. Jadwal pelaksanaan sering berubah dan belum memiliki waktu yang tetap, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkadang tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh pada kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Meskipun demikian, Program Tribina tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dukungan kader dan pihak kelurahan, menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keberlangsungan program meski konsistensi waktu masih perlu diperbaiki.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari kurang memadai. Jumlah kader pada setiap program belum merata, dengan Program Bina Keluarga Balita (BKB) memiliki lima orang kader, sedangkan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) masing-masing hanya didukung oleh tiga orang kader. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas belum berjalan optimal. Selain itu, kemampuan sebagian kader dalam penguasaan materi, teknik penyuluhan, serta penyusunan laporan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas kader menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Tribina masih kurang memadai dan memerlukan penguatan melalui pelatihan serta pembinaan berkelanjutan.

b. Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari tergolong baik dan memadai. Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan meliputi ruang pertemuan yang disediakan oleh pihak kelurahan, proyektor sebagai media penyampaian materi, pengeras suara untuk mendukung kejelasan penyampaian informasi, serta perlengkapan administrasi kegiatan. Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan secara optimal oleh pelaksana program, sehingga kegiatan Program Tribina dapat berjalan dengan lancar.

c. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari sudah memadai dan terealisasi dengan baik. Anggaran program dilaksanakan dalam dua tahap kelompok kegiatan (poktan), yaitu alokasi sebesar Rp900.000 untuk Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) pada tahap pertama, serta alokasi sebesar Rp600.000 pada tahap kedua periode Juli hingga Oktober untuk Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Selain itu, terdapat dukungan anggaran dari pihak kelurahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi dan administrasi seluruh kegiatan Tribina. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan kegiatan di lapangan, sementara hasil dokumentasi memperlihatkan adanya bukti realisasi anggaran berupa foto konsumsi dan pemberian hadiah. Secara keseluruhan, anggaran yang tersedia telah mampu menunjang pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari secara tertib dan berkelanjutan.

3. Disposisi

a. Komitmen/Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan tanggung jawab kader dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari cukup baik. Kader mampu bekerja sama, saling mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan atau kendala yang muncul, sehingga kegiatan tetap berjalan efektif. Hal ini terlihat dari konsistensi kehadiran kader dalam setiap kegiatan, kesiapan mereka dalam mempersiapkan materi maupun perlengkapan, serta kesungguhan kader dari setiap kegiatan.

b. Pengaturan Birokrasi/Kesesuaian Penempatan Kader

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penempatan dan pembagian tugas kader dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari cukup sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pembagian tugas yang tepat membuat setiap kader dapat bekerja optimal sesuai kemampuan, saling mendukung, dan melengkapi satu sama lain dalam menjalankan kegiatan. Kolaborasi dan koordinasi antar kader juga berjalan baik sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana secara efektif, terstruktur, dan tepat waktu.

c. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif kepada kader dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari cukup memadai. Insentif yang diberikan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kader dalam menjalankan kegiatan secara konsisten. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, kader merasa bahwa insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan waktu yang mereka curahkan untuk mendukung program.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Program Tribina di Kelurahan Antasari telah dilaksanakan cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kegiatan berjalan secara terencana dan terstruktur dengan tahapan yang jelas, mulai dari pembukaan kegiatan, penyampaian materi, hingga sesi diskusi bersama peserta. Selain itu, materi yang diberikan kepada peserta disusun dan disampaikan dengan mengacu pada pedoman resmi Program Tribina serta disesuaikan dengan sasaran kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan tertib dan terarah.

b. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari telah berlangsung dengan baik, terstruktur, dan berkesinambungan. Kader, aparat kelurahan, Balai Penyuluhan KB, puskesmas, serta instansi terkait lainnya menjalin komunikasi dan kerja sama yang saling mendukung dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi tersebut berperan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program Tribina, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara tertib dan selaras dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari telah berjalan dengan cukup baik, sistematis, dan partisipatif. Proses evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan diskusi bersama, pengumpulan saran dan kritik dari pihak yang terlibat, serta peninjauan terhadap capaian pelaksanaan kegiatan guna mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Keterlibatan aktif kader, aparat kelurahan, Balai Penyuluhan KB, serta masyarakat sebagai peserta kegiatan menunjukkan adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Tribina. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program.

B. Faktor-Faktor yang memengaruhi Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari. Namun, untuk menjaga efektivitas jangka panjang, perlu dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana yang ada serta penambahan alat pendukung kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini akan memastikan agar setiap kegiatan dapat terus berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat peserta program.

b. Anggaran yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari. Pemanfaatan anggaran mencakup berbagai kebutuhan operasional kegiatan, seperti penyediaan sarana pendukung, pelaksanaan pertemuan atau penyuluhan, serta kegiatan administrasi yang berkaitan dengan jalannya program. Dengan adanya alokasi dana yang cukup, kegiatan dapat berjalan efektif dan mampu menciptakan suasana partisipatif di kalangan masyarakat.

c. Dukungan Pemerintah dan Instansi terkait

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat, merupakan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya memperlancar kegiatan di lapangan, tetapi juga menciptakan suasana kerja harmonis dan saling mendukung di antara pelaksana program.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya inisiatif dan peran kader dalam menyebarluaskan informasi adanya program Tribina di Kelurahan Antasari

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan strategi komunikasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih memahami tujuan serta manfaat Program Tribina. Upaya penguatan komunikasi ini penting karena informasi yang tersampaikan jelas dan menyeluruh mampu membentuk persepsi positif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti kegiatan program.

b. Penyesuaian jadwal/waktu yang sulit untuk ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penjadwalan kegiatan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar partisipasi warga dapat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menetapkan jadwal kegiatan pada waktu yang tidak bertabrakan dengan jam kerja masyarakat atau mengatur jadwal secara rutin dan konsisten agar peserta dapat menyesuaikan lebih mudah.

c. Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi kader

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari segi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan Program Tribina di Kelurahan Antasari. Kurangnya jumlah kader dan belum meratanya kemampuan mereka membuat pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan agar kader memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam hal komunikasi, penyuluhan, dan manajemen kegiatan. Peningkatan kerja sama dengan Balai Penyuluhan KB dan pemerintah kelurahan juga penting untuk memastikan kader mendapatkan dukungan dan bimbingan yang berkesinambungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka peneliti menyimpulkan hasilnya cukup baik yang dilihat dari indikator, *Pertama* penyaluran informasi masih kurang optimal karena sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak semua masyarakat mengetahui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), maupun Bina Keluarga Lansia (BKL). *Kedua* kejelasan informasi sudah baik karena kader berupaya menyampaikan materi dengan jelas meskipun pemahaman masyarakat masih dipengaruhi minimnya sosialisasi awal. *Ketiga* konsistensi informasi atau konsistensi waktu masih kurang konsisten karena jadwal kegiatan sering berubah, sehingga memengaruhi tingkat kehadiran peserta. Selanjutnya, *keempat* sumber daya manusianya kurang memadai karena jumlah kader terbatas sehingga setiap kader harus menangani lebih dari satu tugas sekaligus. Selain itu, kemampuan dan keterampilan beberapa kader masih kurang memadai, sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan akan dapat lebih optimal. *Kelima* sarana dan prasarana sudah baik dan memadai, karena semua fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia. *Keenam* anggaran sudah memadai karena mampu mendukung pelaksanaan kegiatan Tribina di Kelurahan Antasari. *Ketujuh*, komitmen dan tanggung jawab kader cukup baik karena para kader tetap melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan dalam mendukung pelaksanaan Program Tribina. *Kedelapan* kesesuaian penempatan kader juga cukup sesuai dengan kemampuan kader masing-masing di Tribina baik itu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), maupun Bina Keluarga Lansia (BKL). *Kesembilan* insentif cukup memadai. Hal ini karena kader menerima insentif secara rutin pada setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga mampu menjaga motivasi kader dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya *keseperuluh* Standar Operasional Prosedur (SOP) cukup sesuai karena kader Tribina menggunakan pedoman resmi dari BKKBN sebagai acuan pelaksanaan. *Kesebelas* koordinasi tergolong baik karena koordinasi antara PKB Pembina Wilayah, kader, dan kelurahan berjalan cukup baik. Untuk narasumber kegiatan biasanya juga mengundang dari pihak luar seperti Duta GenRe Kecamatan Amuntai Tengah, Penyuluh Agama, dan ahli gizi dari UPT Puskesmas Sungai Karias. *Kedua belas* evaluasi juga termasuk cukup baik. Evaluasi dilakukan pada setiap kegiatan melalui diskusi singkat mengenai jalannya kegiatan, kendala yang ditemui, serta hal yang perlu diperbaiki. Adapun faktor pendukung implementasi program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah *Pertama*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; *Kedua*, anggaran yang cukup memadai; *Ketiga*, dukungan pemerintah dan instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat yaitu *Pertama*, kurangnya inisiatif dan peran kader dalam menyebarluaskan informasi adanya program Tribina di Kelurahan Antasari; *Kedua*, penyesuaian jadwal/waktu yang sulit untuk ditentukan; *Ketiga*, kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi kader dalam mengelola kegiatan Tribina ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) *Metode penelitian kualitatif*. Edited by Rapanna Patta. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.
- BKKBN (2024) “Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI),” pp. 1–51. Available at: <https://www.orangtuahebat.id/wp-content/uploads/2024/12/6.-Pedoman-Penyelenggaraan-Bina-Keluarga-Balita-Holistik-Integratif.pdf>.
- Hariadi (2022) “Implementasi Program Bina Keluarga Remaja Di Kampung Kb Suwandi Mandiri,” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), pp. 358–369.
- Ibrahim (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2022) *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Subarsono (2021) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Sutopo. Bandung: Alfabeta.